



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN DEMAK
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Visi Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah dalam upaya turut mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan Demokratis”**.

Misi Pembangunan Kabupaten Demak 2016-2021 dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, **mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya** sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kab. Demak **“PINTAR”**, terdiri dari :

1. **Profesional**, nilai yang diwujudkan dalam perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku yang digunakan sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan serta senantiasa mengembangkan skill, knowledge, dan attitude .
2. **Integritas**, nilai yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, system nilai, kewajiban kepatutan;
3. **Akuntabel**, nilai yang terwujud melalui kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban bagi setiap individu maupun organisasi.
4. **Responsif**, nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan tantangan yang ada, serta memfasilitasi secara prima;

Adapun Motto layanan Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah “Berpikir Cerdas, Bertindak Tangkas, Bekerja Tuntas”.

Mengacu pada pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak tahun 2021 tidak lepas dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Apa yang sudah di capai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangan dalam pencapaian target-target yang telah di tetapkan. Artinya, apa yang sudah di capai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud haarus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki.
2. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah-masalah yang di hadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman. Gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Demak diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tiap-tiap tahun anggaran berjalan. Perumusan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2021 menjabarkan program-program yang ada di Perangkat Daerah (PD). Dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak untuk Tahun 2021 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) untuk Tahun 2021.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak memuat rencana Program dan Kegiatan untuk Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021 dengan memperhatikan Rencana Kerja DPRD Kab. Demak Tahun 2021 serta kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020. Sehingga **terwujud DPRD yang bermartabat.**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak ini akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 14 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- 21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
- 22 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021.

- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
- 28 Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020;
- 29 Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021
- 30 Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- 31 Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*e-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*e-Budgeting*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (*e-Planning*) dan Penganggaran Elektronik (*e-Budgeting*);
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
- 32 Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.
- 33 Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

1.3. MAKSUD & TUJUAN

1.3.1. Maksud

1. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Demak untuk Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Demak yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 serta Program Unggulan Bupati Demak.

2. Sebagai dokumen penjabaran Renstra PD dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021.
3. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2021.

1.3.2. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 disusun dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 . Latar Belakang
- 1.2 . Landasan Hukum
- 1.3 . Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renca Perangkat Daerah
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Demak sampai dengan Tahun 2020. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada Tahun Anggaran 2019, dilaksanakan untuk :

- 1) mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dimana pada program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah di kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah belum memenuhi target capaian hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD memiliki tugas dan fungsi, di antaranya adalah melaksanakan Pembentukan Raperda. Raperda yang akan dilakukan proses pembahasan harus masuk dalam propemperda yg disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD. Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan fasilitator terhadap kegiatan DPRD, di antaranya adalah proses pembahasan raperda oleh DPRD. Serta di dalam Kegiatan Reses hanya melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Reses dari target 3 (tiga) kali kegiatan, hal ini di akibatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota bahwa pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- 2) upaya untuk perbaikan tata kelola kegiatan reses DPRD akan dibuat aplikasi e-Reses. Aplikasi tersebut akan mengelola data reses, pertanggungjawaban pelaksanaan reses dan terintegrasi dengan data aspirasi. Data aspirasi yang selanjutnya akan menjadi database pokok DPRD akan dikontrol per tahapan pembahasan dari e-planning, e-budgeting sampai dengan penyusunan anggaran.

Dengan adanya database data tersebut akan memudahkan dalam penelusuran jejak/track record nya.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Demak selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Pada tahun 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mendapatkan Anggaran sebesar Rp 44.117.790.000,- dari APBD Tahun Anggaran 2019 realisasi anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 36.463.500.614 atau (82.65%). Anggaran sejumlah Rp 44.117.790.000,- dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebanyak Rp 3.354.790.000,- dan belanja langsung sebanyak Rp.40.763.000,-

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi belanja tidak langsung adalah sebanyak Rp 2.785.469.566,- (86.38%) dari anggaran yang tersedia sebanyak Rp 3.224.503.000,- sedangkan belanja langsung dari anggaran yang ada sebanyak Rp. 40.763.000.000 terealisasi sebesar Rp. 33.549.660.963 atau sebanyak (82.30%). Selanjutnya dilihat total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak sebesar 82,65 %.

No	Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Pengeluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
										Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan (n-1) 2020	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)			
1						2		3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4	
	OPD					SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK												
						PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN												
1	1	20	11	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi perkantoran				-								
1				101	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlayannya administrasi perkantoran	36 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
1	20	1	2		Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik	Tercapainya kelancaran komunikasi telepon, air dan listrik	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
1	20	1	7		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksana kegiatan	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
					Penyediaan jasa kebersihan Kantor (Cleaning Service)	Kebersihan Kantor seluas 2.539 m2	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
1	20	1	10		Penyediaan ATK	Tersedianya ATK	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
1	20	1	11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terseduanya barang cetakan dan penggandaan	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
1	20	1	12		Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				
1	20	1	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %				

1	20	1	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undang	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %
					penyediaan bahan logistik kantor		36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %
1	20	1	17		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %
1	20	1	18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %
1	20	1	19		Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	36 bulan	24 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	36 bulan	100 %
1	20	1	20		penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		24 bulan	12 bulan	12 bln	12 bln	100 %	-	24 bulan	100 %
1	20	1	21		Perawatan/Pengobatan Kesehatan		50 orang	0	50 org	50 org	100 %	-	50 orang	100 %
1	20	2	11	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana/prasarana aparatur (bulan) yang terpenuhi								
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	23 unit	13 unit	3 unit	3 unit	100 %	2 unit	18 unit	78 %
					Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas	Kelancaran tugas dan pekerjaan	36 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	24 bulan	67 %
					Pengadaan perlengkapan gedung /kantor	Kelancaran dan perlengkapan pelayanan pekerjaan	48 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	100 %
					Pengadaan peralatan gedung /kantor	Kelancaran tugas dan pekerjaan	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
					Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan	Pengadaan bahan / material rumah Jabatan (bln)	48 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	36 bulan	75 %
					Pemeliharaan rutin / berkala gedung / kantor	Pengadaan bahan / material pemeliharaan gedung kantor seluas 5000 m2	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
					Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Pengadaan suku cadang dan bahan untuk perawatan mobil dinas pimpinan 5	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %

					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan dalam Daerah	Terlaksananya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi secara vertikal dan horisontal	24 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	50%
					Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Terbayarnya pegawai non PNS	24 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	50%
					penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Asuransi BMD yang di asuransikan	24 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	50%
					Perawatan/Pengobatan Kesehatan	Jumlah Perawatan/Pengobatan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD	100 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	50 %
					Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol	Jumlah berita yang di sebar luaskan melalui media,sarana publik dan penyediaan logistik	24 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	50 %
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur								-	
					Pengadaan pakaian dinas .	Pengadaan PSH 100 buah, PDH 50 buah, PSR 50 buah.(bln)	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
					Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur								-	
					Bimbingan tehnik implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pemahaman tugas dan fungsi meningkat., peningkatan kinerja aparatur	165 orang	70 orang	60 orang	60 orang	100 %	60 orang	60 orang	152%
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan.								-	
					1. Penyusunan pelaporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya RKA, DPA, dan SPJ 202 bendel (bln)/ Tersusunnya RKA, DPA, LAKIP, RENJA, LKPJ TAPKER	5	3	-	-	-		3	60 %

					Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.									
					Pembahasan rancangan peraturan daerah	Disetujui / ditetapkannya peraturan daerah	80 perda	20 perda	26 perda	16 perda	61 %	23 perda	59 perda	74 %
					Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.	Terlaksananya diklat peningkatan tugas dan fungsi Anggota Dewan (kl)	34 kali	16 kali	6 kali	6 kali	100 %	6 kali	28 kali	82 %
					Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang di laksanakan oleh pimpinan DPRD	20 kali	0	0	0	0	20 kali	20 kali	100 %
					Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	jumlah Rapat-rapat DPRD, Jumlah kegiatan reses yang di laksanakan oleh anggota DPRD, jumlah kegiatan haering/dialog publik yang di laksanakan, jumlah dialog kebangsaan yang di laksanakan'	192 keg	0	0	0	0	192 kegi	192 keg	100 %
					Hearing/dialog dengan Pem da dan tokoh masyarakat / tokoh agama	Dihasilkannya keputusan DPRD yang sesuai produk hukum yang berlaku (keg)	128	63	-	-	-	-	63	49 %
					Rapar-rapat alat kelengkapan Dewan	Terbahasnya raperda-raperda yang diajukan. (rpt)	4.150	1.152	-	-	-	-	1.152	28 %
					Rapat - rapat Paripurna.	Pembahasan dan penetapan raperda	186	141	-	-	-	-	141	76 %
					Kegiatan Reses.	Terserapnya masukan dan aspirasi konstituen & masyarakat. (reses)	15	12	-	-	-	-	12	80 %
					Kunjungan kerja pimpinan & anggota DPRD dlm daerah	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kab. Demak	480	206	-	-	-	-	206	43 %
					Kunjungan Kerja / Studi Banding keluar Daerah.	Bertambahnya Wawasan / Pengetahuan Anggota DPRD (kl)	55	22	-	-	-	-	22	40 %

					Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Tersusunnya 10 (sepuluh) raperda inisiatif dan Naskah Akademik	59	17	-	-	-	-	17	28 %
					Penyediaan jasa Publikasi, Dokumentasi dan Keprotokolan	Tersebarinya informasi kegiatan DPRD	44	46	-	-	-	-	46	107 %
					Penyusunan buku memori DPRD masa bhakti memori DPRD masa bhakti 2009-2014 / Penyusunan buku memori risalah DPRD Kab Demak	Terbukunya kegiatan DPRD masa bhakti 2009 - 2013	125	125	-	-	-	-	125	100 %
					10 Pelaksanaan pemilihan dan penetapan wakil Bupati		2	-	-	-	-	-	-	0
					11. Pelaksanaan Pelantikan/Sumpah Janji Wakil Bupati		2	-	-	-	-	-	-	0
					Pelantikan / pengambilan sumpah / janji anggota DPRD masa bhakti 2019 – 2024	Terlantiknya 50 anggota DPRD Kab. Demak masa bhakti 2014 - 2019	50	50	-	-	-	-	50	100 %
					Penetapan dan pelantikan Pimpinan DPRD masa bhakti 2014-2019	Terlantiknya 4 Pimpinan DPRD Kab. Demak masa bhakti 2014 - 2019	4	4	-	-	-	-	4	100 %
					Penyusunan Risalah Rapat – rapat	Tersusunnya risalah rapat	175	141	-	-	-	-	141	81 %
					Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa					-	-	-	-	0
					Penyebarluasan Informasi Pembangunan daerah		44	20			-	-	20	45 %

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2018:

1. Indeks kepuasan aparatur;
2. Porsentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja;
3. Persentase pembahasan Raperda;
4. layanan terhadap agenda DPRD

Pada Tahun 2020 terdapat 8 Program di dalam Renstra Sekretariat DPRD Kab. Demak, yaitu:

1. Program Kerjasama Informasi Mass Media;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah

Sedangkan di Tahun 2020 terdapat penyesuaian cascading Renstra Sekretariat DPRD Kab. Demak, sehingga di Tahun 2020 terdapat perubahan Program yang sebelumnya terdiri dari 8 Program berubah menjadi 3 Program yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Analisis indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kab. Demak dapat tersaji pada tabel 2.2. sebagaimana terlampir.

Dari tabel indikator kinerja pelayanan tersebut diatas dapat disampaikan bahwa terdapat 6 Program yang pencapaian indikatornya mencapai 100 % atau lebih dari 100 % yaitu:

1. Program Kerjasama Informasi Mass Media;
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Sedangkan pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketidaktercapaian pada indikator Jumlah Perda yang dibahas dari target 30 Raperda di Tahun 2019 terealisasi 15 Raperda yang ditetapkan (50 %) sedangkan di Tahun 2020 dari target Raperda ditetapkan sebanyak 26 Raperda terealisasi sebanyak 8 buah Raperda (30,77%) di semester I. Kondisi ini dikarenakan di Tahun 2020 terdapat musibah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, dari uraian diatas, secara keseluruhan realisasi program dan kegiatan baik keuangan maupun fisik untuk tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2019.

Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan adalah:

- a. Tidak semua alat kelengkapan di DPRD mengusulkan usulan Raperda (Usulan Raperda inisiatif dari Alat Kelengkapan sedikit).
- b. Efisiensi penggunaan anggaran;
- c. Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda Pimpinan dan Anggota Dewan serta Alat Kelengkapan.
- d. Dinamika kegiatan Dewan yang sangat cepat dan padat sehingga seringkali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu-waktu.
- e. Dinamika politik yang berkembang di DPRD sulit diprediksi secara pasti.
- f. Kesibukan dalam pembahasan anggaran dan Peraturan Daerah menyebabkan beberapa jadwal kegiatan Dewan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sehingga berakibat pada tidak terserapnya anggaran.
- g. Beberapa target kinerja kegiatan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan riil yang berkembang.

Dalam perjalanan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak tentu saja ada kendala yang dihadapi, namun beberapa upaya telah dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu dengan:

- a. Secara berkala telah melakukan komunikasi, Anggota dan Pimpinan Alat kelengkapan DPRD apabila ada permasalahan mendesak diadakan Rapat Gabungan Pimpinan Alat Kelengkapan.
- b. Menyampaikan informasi kepada Pimpinan DPRD Alat Kelengkapan terkait dengan program, kegiatan dan anggaran yang belum dilaksanakan serta memberikan pertimbangan argumentasi kepada Pimpinan DPRD terkait penyerapan anggaran.
- c. Penjadwalan kegiatan / agenda Dewan melalui Rapat Badan Musyawarah dan melaksanakan Rapat Pimpinan DPRD bilamana dipandang perlu mengubah

jadwal kegiatan yang sudah diputuskan Badan Musyawarah DPRD atau saat terdapat usulan alat kelengkapan DPRD untuk melakukan perubahan jadwal kegiatan

Dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, untuk perencanaan kegiatan dan anggaran kedepannya diusahakan memperhatikan baik realisasi keuangan maupun hasil yang dicapai di tahun tahun sebelumnya. Hanya saja kesulitan di Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan kegiatan sangat tergantung dengan Dewan sehingga ada beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak., Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang meliputi tugas kesekretariatan DPRD, administrasi umum dan hubungan masyarakat, administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD, dukungan perundang-undangan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPR yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Demak berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi Kabupaten Demak.

Adapun Visi Kabupaten Demak adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan Demokratis”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pembangunan kewilayahan dan menyerasikan pembangunan antara kota dan desa;
5. Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sesuai standar;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif;

7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;
8. Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya Alam berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah: **“Reformasi Birokrasi.”**

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kabupaten Demak.

Adapun Sasaran yang akan dicapai: **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan DPRD”**.

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya:

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

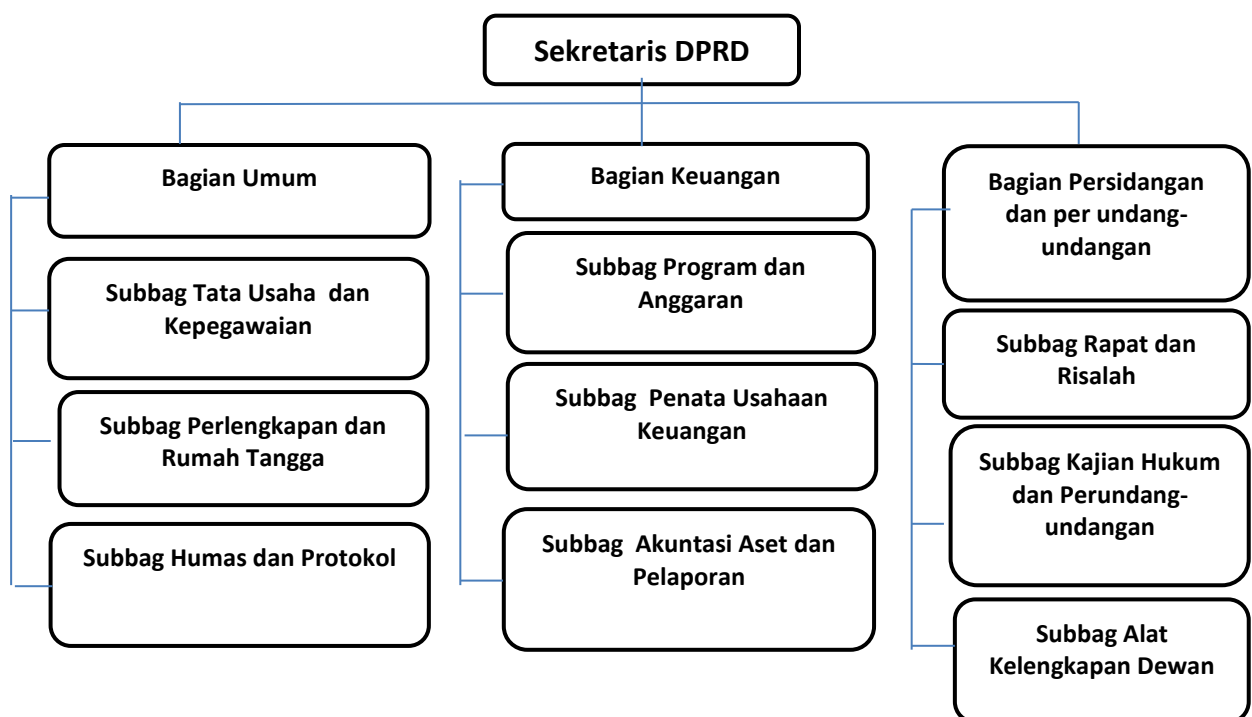
Sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, kelembagaan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu:

1. Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, pelaporan berkala, perlengkapan, pembekalan kendaraan dinas, rumah tangga DPRD dan Sekretariat DPRD serta pembekalan kendaraan dinas DPRD.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam merumuskan kebijakan, menkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang rapat, risalah, kehumasan, protokol dan pelayanan rapat-rapat.

3. Bagian Legislasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang Legislasi.

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
2. Kepala Bagian Umum, yang membawahi tiga Sub.Bagian:
 - a. Sub.Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub.Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub. Bagian Humas dan Protokol;
3. Kepala Bagian Keuangan, yang membawahi tiga Sub.Bagian:
 - a. Sub.Bagian Program dan Anggaran;
 - b. Sub.Bagian Penatausahaan Keuangan;
 - c. Sub.Bagian Akutansi, Aset dan Pelaporan.
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang - undangan, yang membawahi tiga Sub.Bagian:
 - a. Sub.Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub.Bagian Kajian Hukum dan Perundang - undangan;
 - c. Sub.Bagian Alat Kelengkapan Dewan.



Jumlah sumber daya manusia di Kasubag Program dan Penganggaran berjumlah sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 orang sebagai Kasubag Program dan Anggaran dan 1 orang staf. Ketersediaan jumlah sumber daya manusia ini dipandang belum memadai. Sedangkan jumlah sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kab. Demak juga mencukupi jumlahnya.

Tabel 1

Data Jumlah Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kab.Demak

No	Status	Jenis kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	24	7	31
2.	Kontrak	10	14	24
3	Staf Ahli Fraksi	7	0	7
3.	Outsourcing	10	0	10
	Jumlah	51	21	72

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu:

a. Kelembagaan dan Organisasi

Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan fungsi fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD belum optimal, sehingga diperlukan penyesuaian Rencana Kerja DPRD dengan Rencana Kerja Sekretariat DPRD, sehingga seluruh ketugasan anggota DPRD terjabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

b. Sumber Daya Manusia

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Demak, baik dari sisi kualitas.
- 48 % dari keanggotaan DPRD Kab. Demak periode 2019-2024 merupakan anggota DPRD baru sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap kegiatan anggota DPRD;

- c. Ketugasan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- d. Regulasi
Dinamika peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.
- e. Sarana dan Prasarana
Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana kerja pada tiap-tiap unit kerja sesuai kebutuhan.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut:

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme serta kemampuan Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan.
4. Kebijakan Reformasi Birokrasi menjadi daya dorong guna mewujudkan perubahan pada mental aparatur, organsiasi, tata laksana, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public dan peraturan perundang-undangan.

2.3.4 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Demak untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Demak.

b. Kebijakan Strategis

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola;
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian;
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi;
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional;
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pelatihan dan studi banding serta konsultasi;
7. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi.
8. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD;
9. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.4.1. Membandingkan rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Sekretariat DPRD didukung dengan 3 program dan 8 Subkegiatan dengan total anggaran Rp.69.089.276.000,- seperti dilihat pada Tabel 2.3. Adapun Pembagian Program dan Kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD 2020 yang disampaikan dalam Surat Sekreatris Daerah Kab. Demak tentang Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang telah di lakukan pemetaan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 2. Program Layanan Dan Administrasi Keuangan**
- 3. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**

untuk perkiraan anggaran antara pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD dengan kebutuhan belum sesuai dikarenakan banyaknya usulan dari masing masing Alat Kelengkapan DPRD.

2.4.2. Alasan proses tersebut dilakukan

Diharapkan Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja 2021 tetap mendasarkan usulan dari semua unsur Alat Kelengkapan DPRD yang nantinya tertuang dalam Rencana Kerja DPRD, disamping tetap memperhatikan realisasi tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

2.4.3. Temuan setelah proses

Dalam proses ini Sekretariat DPRD dalam penyusunan Renja Tahun 2021 mengakomodir usulan dari Alat Kelengkapan yang masuk sehingga setelah ditata dalam program dan kegiatan, pagu yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD belum mencukupi.

RENSTRA				NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019										
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KODE				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>							PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>			
			<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>								<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
			<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>								<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>			
		Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan	4	2	3	2.01	2		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan
											<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
		Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	Notulensi hearing	4	2	3	2.04	6		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Notulensi hearing
											<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
											<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>			
		Kegiatan Reses	Tersedianya dokumen hasil reses DPRD	4	2	3	2.05	3		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan reses	Tersedianya dokumen hasil reses DPRD

		Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Laporan kunjungan kerja yang disusun	4	2	3	2.05	1			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kunjungan kerja Dalam Daerah	Laporan kunjungan kerja yang disusun
		Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumah anggota DPRD yang mengikuti bimtek	4	2	3	2.04	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bimbingan Teknis DPRD	Jumah anggota DPRD yang mengikuti bimtek
												<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
		Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah Naskah Akademis yang disusun	4	2	3	2.01	3			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Naskah Akademis yang disusun
												<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
		Kunjungan Kerja/Studi Banding Keluar Daerah	Laporan pelaksanaan kunjungan kerja/ studi banding luar daerah	4	2	3	2.01	1			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Pembentukan Program Peraturan Daerah	Laporan pelaksanaan kunjungan kerja/ studi banding luar daerah
												<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
		Publikasi dan Dokumentasi	Jenis media yang digunakan untuk dokumentasi dan publikasi	4	2	3	2.04	6			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jenis media yang digunakan untuk dokumentasi dan publikasi
												<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
												<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>			

		Penyusunan Risalah Rapat	Jumlah risalah rapat yang disusun	4	2	3	2:01	1			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Pembetulan perda dan peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Pembentukan Program Peraturan Daerah	Jumlah risalah rapat yang disusun
												<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
												<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>			
		- Penyusunan Buku Memori DPRD masa bhakti 2014 - 2019	Jumlah buku memori	4	2	3	2:04	3			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	<i>Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda</i>	Peningkatan Kapasitas DPRD	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah buku memori
												<i>Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda</i>			
												<i>Tersedianya dokumen hasil reses DPRD</i>			
		- Pemaparan visi/misi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dilantiknya KDH dan WKDH	4	2	2	2:01	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<i>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan</i>	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	Dilantiknya KDH dan WKDH
		- Pelaksanaan pelantikan / sumpah janji KDH dan WKDH terpilih		4	2	2	2:01	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<i>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan</i>	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	
		- Penetapan Pelantikan Pimpinan DPRD masa bhakti 2019 - 2024	Terlaksananya Pengambilan Sumpah/janji Pimpinan	4	2	2	2:01	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<i>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan</i>	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	Terlaksananya Pengambilan Sumpah/janji Pimpinan
		- Pelaksanaan Pelantikan Pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD masa bhakti 2019- 2024	Jumlah Anggota DPRD yang dilantik	4	2	2	2:01	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<i>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan</i>	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dilantik

		Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah rapat yang dilakukan	4	2	3	2.01	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilakukan
		Rapat-rapat paripurna	Jumlah rapat yang dilakukan	4	2	3	2.01	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan	Layanan Administrasi DPRD	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat yang dilakukan
		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya tingkat disiplin aparatur/anggota dewan	4	2	2	2.02	2			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan	Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	jumlah PNS/anggota dewan yang menerima pakaian dinas
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah PNS/anggota dewan yang menerima pakaian dinas												
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan								PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan			
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	terpeliharanya peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD	4	2	2	2:01	4			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan DPRD	terpeliharanya peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan	4	2	2	2:01	4			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan DPRD	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Dinas	terpenuhinya rumah dinas bagi Pimpinan Dewan	4	2	2	2:01	4			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah tangga Pimpinan DPRD	terpenuhinya rumah dinas bagi Pimpinan Dewan
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas	X	XX	1	2.03	20			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas

		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	X	XX	1	2.03	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor
		Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	X	XX	1	2.03	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	tersedianya peralatan gedung kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keamanan dan kenyamanan gedung/kantor	X	XX	1	2.03	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keamanan dan kenyamanan gedung/kantor
		Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kelancaran mobilitas Pimpinan DPRD	4	2	2	2:01	5			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<i>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan</i>	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Kelancaran mobilitas Pimpinan DPRD
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD	4	2	2	2:01	5			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	<i>Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan anggota dewan</i>	Layanan Administrasi DPRD	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	terpeliharanya peralatan rumah dinas Pimpinan DPRD
		Program pelayanan administrasi Perkantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun			
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	X	XX	1	2.03	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah Penyediaan jasa langganan listrik, air, internet dan telepon 7 unit gedung	X	XX	1	2.03	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan jasa langganan listrik, air, internet dan telepon 7 unit gedung
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga	X	XX	1	2.03	3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga

		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah pengelolaan keuangan keuangan dan pengelolaan barang yang di beri honor	X	XX	1	2.03	7			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah pengelolaan keuangan keuangan dan pengelolaan barang yang di beri honor
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan gedung dan rumah dinas yang di sediakan	X	XX	1	2.03	8			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan gedung dan rumah dinas yang di sediakan
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang Tersedianya	X	XX	1	2.03	10			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang Tersedianya
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	X	XX	1	2.03	11			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektronik yang tersedia	X	XX	1	2.03	12			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah perlengkapan listrik dan elektronik yang tersedia
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga	X	XX	1	2.03	13			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan perlengkapan rumah tangga
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an	X	XX	1	2.03	15			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Per UU an
		Penyediaan bahan logistik kantor	Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan (Karnaval dll)	X	XX	1	2.03	16			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan (Karnaval dll)
		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman (harian, besar, tamu)	X	XX	1	2.03	17			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman (harian, besar, tamu)

		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	X	XX	1	20.3	18			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
		Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah honorarium bagi Non PNS kantor dan rumah dinas yang di bayarkan	X	XX	1	202	2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Keuangan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah honorarium bagi Non PNS kantor dan rumah dinas yang di bayarkan
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran mobilitas Sekretariat DPRD	X	XX	1	203	30			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dalam satu tahun	Administrasi Umum	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kelancaran mobilitas Sekretariat DPRD
		Program peningkatan kapaitas sumberdaya aparatur	Cakupan aparatur Setwan yang mendapatkan peningkatan kapasitas								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan aparatur Setwan yang mendapatkan peningkatan kapasitas			
		- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kinerja aparatur	X	XX	1	204	11			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan aparatur Setwan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan kinerja aparatur
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terbangunnya sistem informasi dan publikasi berbasis WEB												
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah berita yang disebarluaskan melalui mass media	4	2	3	2.04	6			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dalam prolegda	Peningkatan Kapasitas DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jenis media yang digunakan untuk dokumentasi dan publikasi
												Persentase perda inisiatif yang disahkan menjadi perda			
												Tersedianya dokumen hasil reses DPRD			

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pada tahun 2021 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat DPRD seperti dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel T-C,32.

Usulan program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Pada Tahun 2021
Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2021 tema pembangunan nasional adalah: ***‘Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial’***.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional tersebut maka disusun 5 prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Lima prioritas nasional tersebut adalah:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang tercantum pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yaitu: ***“Peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang didukung penguatan daya saing sumber daya manusia”***. Tema tersebut dijabarkan dalam empat prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing;
3. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak, maka dirumuskan temapembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Demak Tahun 2021 yaitu: **“Mempercepat pemulihan ekonomi dan Sosial menuju masyarakat Demak yang agamis dan sejahtera”** lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan di Kabupaten Demak, sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Sistem Pelayanan Kesehatan dan Kebencanaan;
2. Pemulihan Kinerja Perekonomian, Pariwisata, Iklim Investasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan;
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial dan Stabilisasi Ketahanan Keamanan;
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Agamis dan Berkualitas;
5. Penyediaan Infrastruktur yang Mendukung Pemulihan Ekonomi

Secara lebih jelasnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2021 dengan prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada pengelompokan sasaran pembangunan Kabupaten Demak berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kabupaten Demak sebagai berikut:

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kabupaten Demak
1.	Pembangunan Sumber Daya manusia;	Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;	Peningkatan Mutu Sistem Pelayanan Kesehatan dan Kebencanaan;
2	Pembangunan Infra struktur;	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing;	Pemulihan Kinerja Ekonomi, Pariwisata, Iklim Investasi dan Peningkatan Ketahanan pangan;
3	Penyediaan Regulasi;	Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana;	Penyediaan jaring pengaman social dan stabilisasi ketahanan keamanan;

4	Penyederhanaan Birokrasi;	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.	Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Agamis dan Berkualitas;
5	Transformasi Ekonomi		Penyediaan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK

3.2.1. Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2021 disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak untuk Tahun 2021, agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sasaran

Sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, Sekretariat DPRD dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Demak harus dapat mewujudkan peningkatan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan.

Dalam rangka peningkatan fungsi fasilitasi tersebut, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak sesuai dengan ketugasan DPRD Kabupaten Demak.

Sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah terwujudnya kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung penyelesaian agenda DPRD.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1. Faktor Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Demak dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, sarana prasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perlu dukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

3.3.2. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Renja 2017 ini terbagi dalam 8 (Delapan) program internal dengan 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan. Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2017:

1. Program Kerjasama Informasi Mass Media, meliputi Kegiatan:
 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - e. Penyediaan alat tulis kantor;
 - f. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyediaan bahan logistik;
 - k. Penyediaan bahan makan minum;
 - l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - m. Penyediaan jasa pegawai non PNS
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

- f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi Kegiatan:
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi Kegiatan:
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi Kegiatan:
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Kegiatan:
 - a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - c. Rapat-rapat paripurna;
 - d. Kegiatan Reses;
 - e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
 - f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - g. Kunjungan kerja / studi banding keluar Daerah;
 - h. Publikasi dan Dokumnetasi;
 - i. Penyusunan risalah rapat;
 - j. Penyusunan raperda inisiatif DPRD;
 - k. Pembahasan rancangan Perda
 8. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah, meliputi Kegiatan: Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah.
Dalam penyusunan Renja 2018 ini terbagi dalam 7 (tujuh) program internal dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2018:
 1. Program Kerjasama Informasi Mass Media, meliputi Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa barang milik daerah;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

- f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/openerangan bangunan kantor;
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyediaan bahan logistic;
 - l. Penyediaan bahan makan minum;
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - n. Penyediaan jasa pegawai non PNS
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan:
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi Kegiatan:
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Kegiatan:
- a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - c. Rapat-rapat paripurna;
 - d. Kegiatan Reses;
 - e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
 - f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - g. Kunjungan kerja / studi banding keluar Daerah;
 - h. Publikasi dan Dokumentasi;
 - i. Penyusunan risalah rapat;
 - j. Penyusunan raperda inisiatif DPRD;

- k. Pembahasan rancangan Perda;
- l. Medical check up

Dalam penyusunan Renja 2019 ini terbagi dalam 6 (enam) program internal dengan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan. Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2019:

1. Program Kerjasama Informasi Mass Media, meliputi Kegiatan:
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi Kegiatan:
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jaminan barang milik daerah;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - f. Penyediaan alat tulis kantor;
 - g. Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan;
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/openerangan bangunan kantor;
 - i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyediaan bahan logistic;
 - l. Penyediaan bahan makan minum;
 - m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - n. Penyediaan jasa pegawai non PNS
 - o. Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota:
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan:
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi Kegiatan:

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi Kegiatan:
 - a. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
 - b. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
 - c. Rapat-rapat paripurna;
 - d. Kegiatan Reses;
 - e. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
 - f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - g. Pembahasan rancangan Perda;
 - h. Penyusunan buku memori DPRD masa bhakti 2014 - 2019
 - i. Pelaksanaan pelantikan pengambilan sumpah janji anggota DPRD masa bhakti 2019 - 2024;
 - j. Penetapan pelantikan pimpinan DPRD masa bhakti 2019-2024.

Dalam penyusunan Renja 2020 ini terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Berikut pembagian Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD untuk Tahun 2020:

1. Program Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan:
 - a. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas;
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - h. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - i. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - j. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah;
 - k. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - l. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - m. Penyediaan alat tulis kantor;
 - n. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - o. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - p. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - q. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan;
 - r. Penyediaan makanan dan minuman;

- s. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - t. Penyediaan jasa pegawai non PNS
 - u. Perawatan/pengobatan kesehatan;
 - v. Fasilitasi kehumasan, publikasi dan protocol.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi Kegiatan:
- a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
3. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah, meliputi Kegiatan:
- a. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. Pembahasan rancangan perda;
 - c. Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2021

4.1 Tabel Rencana Program dan Kegiatan

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPRD dengan Indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD atas fasilitasi Sekretariat DPRD. Untuk Rencana Kerja Tahun 2021, Sekretariat DPRD memiliki 3 Program dan 8 Kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program Urusan pemerintah Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. Administrasi Keuangan;
 - b. Administrasi Umum;
 - c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
2. Program Layanan dan Administrasi Keuangan, meliputi kegiatan:
 - a. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
 - b. Layanan Administrasi DPRD
3. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi kegiatan:
 - a. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
 - b. Peningkatan Kapasitas DPRD;
 - c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagaimana terlampir.

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya gaji pegawai Non PNS	SEKRET ARIAT DPRD	25.0 orang	562,300,800.00	APBD		Terbayarnya gaji pegawai Non PNS	618,530,880
				Belanja Tenaga Kerja Non Pegawai	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	SEKRET ARIAT DPRD	12 bulan	349,260,000.00	APBD		Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	384,186,000
				Administrasi Umum	Terakomodasinya Sarana Administrasi umum	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 Bulan	7,791,334,200.00	APBD		Terakomodasinya Sarana Administrasi umum	8,570,467,620
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	SEKRET ARIAT DPRD	1400.0 surat	31,040,000.00	APBD		Jumlah surat yang dikirim	34,144,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 Bulan	283,800,000.00	APBD		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	312,180,000
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium pengelola keuangan	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	163,200,000.00	APBD		Tersedianya honorarium pengelola keuangan	179,520,000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (12 Bulan)	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	165,300,000.00	APBD		Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan (12 Bulan)	181,830,000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	170,000,000.00	APBD		Tersedianya Alat Tulis kantor	187,000,000

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 Bulan	34,750,000.00	APBD		Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan	38,225,000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SEKRET ARIAT DPRD	1.0 Tahun	27,000,000.00	APBD		terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29,700,000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	25,778,200.00	APBD		tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	28,356,020
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Banyak Bahan Bacaan yang Disediakan	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	37,400,000.00	APBD		Jumlah Banyak Bahan Bacaan yang Disediakan	41,140,000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	30,000,000.00	APBD		Terpenuhinya bahan logistik kantor	33,000,000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	SEKRET ARIAT DPRD	12.0 bulan	392,580,000.00	APBD		Terpenuhinya makan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	431,838,000

				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	2,980,560,000.00	APBD		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD	3,278,616,000
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas oprasional	SEKRETARIAT DPRD	1.0 Tahun	1,102,050,000.00	APBD		Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas oprasional	1,212,255,000
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	124,250,000.00	APBD		Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor DPRD	136,675,000
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan Gedung Kantor DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	615,200,000.00	APBD		Terpenuhinya kebutuhan peralatan Gedung Kantor DPRD	676,720,000
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keamanan dan Kenyamanan Gedung Kantor DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 Bulan	693,197,000.00	APBD		Keamanan dan Kenyamanan Gedung Kantor DPRD	762,516,700

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah mobil dinas oprasional yang dilakukan pemeliharaan	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	773,824,000.00	APBD		jumlah mobil dinas oprasional yang dilakukan pemeliharaan	851,206,400
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukab pemeliharaan	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	141,405,000.00	APBD		jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukab pemeliharaan	155,545,500
			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD	110.0 orang	478,110,000.00	APBD		Jumlah Aparatur Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	525,921,000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur (ASN) Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD	110.0 orang	478,110,000.00	APBD		Jumlah aparatur (ASN) Sekretariat DPRD yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan	525,921,000
			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Terlaksananya Layanan Administrasi keuangan	SEKRETARIAT DPRD	12.0 Bulan	2,111,959,000.00	APBD		Terlaksananya Layanan Administrasi keuangan	2,323,154,900

				Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Administrasi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 Bulan	1,461,564,000.00	APBD		Terlaksananya Administrasi DPRD	1,607,720,400
				Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang di lakukan, serta jumlah rapat paripurna yang di laksanakan	SEKRETARIAT DPRD	12.0 Bulan	978,700,000.00	APBD		Jumlah rapat alat kelengkapan dewan yang di lakukan, serta jumlah rapat paripurna yang di laksanakan	1,076,570,000
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	terpenuhinya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	482,864,000.00	APBD		terpenuhinya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	531,150,400
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terwujudnya pelayanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 Bulan	650,395,000.00	APBD		Terwujudnya pelayanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	715,434,500
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya pakaian dinas dan beserta perlengkapannya	SEKRETARIAT DPRD	1.0 Tahun	650,395,000.00	APBD		Terpenuhinya pakaian dinas dan beserta perlengkapannya	715,434,500

				pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	SEKRETARIAT DPRD	12 bulan	587,300,000.00	APBD		Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	646,030,000
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	24,180,838,250.00	APBD		Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	26,598,922,075
				Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembahasan raperda dan peraturan DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 Perda dan Peraturan DPRD	15,591,013,250.00	APBD		Terlaksananya pembahasan raperda dan peraturan DPRD	17,150,114,575
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan pembentukan program peraturan daerah	SEKRETARIAT DPRD	12.0 tahun	10,460,911,250.00	APBD		Terlaksananya pembahasan pembentukan program peraturan daerah	11,507,002,375
				Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya pembahasan Rancangan Perda	SEKRETARIAT DPRD	4.0 kegiatan	4,117,330,000.00	APBD		Terlaksananya pembahasan Rancangan Perda	4,529,063,000
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya kajian perundang-undangan	SEKRETARIAT DPRD	4.0 kegiatan	1,012,772,000.00	APBD		Terlaksananya kajian perundang-undangan	1,114,049,200
				Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	SEKRETARIAT DPRD	1 keg	605,700,000.00	APBD		Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas	666,270,000

				Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kompetensi DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	4,681,324,500.00	APBD		Terlaksananya peningkatan kompetensi DPRD	5,149,456,950
				Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya bimbingan teknis bagi anggota DPRD	SEKRETARIAT DPRD	6.0 kegiatan	3,427,020,000.00	APBD		Terlaksananya bimbingan teknis bagi anggota DPRD	3,769,722,000
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah hearing/dialog, audiensi dan komunikasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	1,254,304,500.00	APBD		Jumlah hearing/dialog, audiensi dan komunikasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama	1,379,734,950
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	3,908,500,500.00	APBD		Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	4,299,350,550
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah DPRD	SEKRETARIAT DPRD	12.0 bulan	1,423,800,000.00	APBD		Terlaksananya kunjungan kerja dalam daerah DPRD	1,566,180,000

BAB V

PENUTUP

1. Catatan Penting

Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan yang sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Demak hasil reuiu tahun 2019, namun dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengharuskan peraturan ini sudah dilaksanakan, untuk mensikapi peraturan tersebut maka dilakukan mapping program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Demak tahun 2016-2021 ada beberapa indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Demak yang belum tercapai sesuai dengan target, hal ini akan berimplikasi pada pendanaan, program dan kegiatan yang mendukung tercapainya salah satu indicator yang belum tercapai dimungkinkan akan ditambahkan sehingga diakhir tahun RPJMD dapat tercapai, namun disisi yang lain OPD yang telah tercapai akan dikurangi anggaran.

Untuk mensikapi bila anggaran proram dan kegiatan dikurangi untuk hal tersebut diatas, maka dipilih program dan kegiatan yang sangat prioritas untuk mendukung capaian program yang sampai tahun berjalan belum tercapai

2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders*.

3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja 2021 maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengkomunikasian/sosialisasi renja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan tidak menyimpang dari renja;

3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam renja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan renja yang telah dibuat;

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga renja 2021 yang telah dibuat dapat diwujudkan demi tercapainya tujuan akhir bersama.

Demak 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN DEMAK



Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016